

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGEMBALIAN SISA
PEMBELIAN DENGAN BARANG**

(Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

WULAN WIDIYA ASTUTI

NPM : 1421030310

Program Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGEMBALIAN SISA
PEMBELIAN DENGAN BARANG**

(Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

WULAN WIDIYA ASTUTI

NPM : 1421030310

Program Studi : Mu'amalah

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.

Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M. Hum.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

Pedagang Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung telah melakukan praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang kepada mahasiswa. Hal ini terkadang menimbulkan permasalahan antara pedagang kantin dan mahasiswa, namun terkadang pihak pedagang seringkali mengabaikan keluhan mahasiswa. Selain itu yang menjadi masalah lainnya adalah pihak pedagang seolah-olah tidak memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menolak permen sebagai pengembalian sisa pembelian. Apabila mahasiswa menolak permen sebagai pengembalian sisa pembelian tersebut maka pihak pedagang hanya menjawab tidak mempunyai uang kecil.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang yang dilakukan pedagang Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengembalian sisa pembelian dengan barang tersebut. Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan diperkaya dengan data kepustakaan. Adapun populasi dalam penelitian ini yakni pedagang Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung yang berjumlah 11 orang dan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang berjumlah 35 orang. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan antara lain metode wawancara atau interview dan observasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa akad pada praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang merupakan akad jual beli yang hanya diberikan atau kebijakan pedagang tetapi tidak adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan mahasiswa. Sehingga mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas mahasiswa harus menerima uang kembalian berupa permen. Hasilnya, tawaran uang kembalian diganti dengan permen seperti sebuah tawaran paksaan yang mana mahasiswa tidak mempunyai pilihan selain berkompromi dan menerima permen dengan lapang dada, meski sebenarnya tidak sedang membutuhkan permen. Tidak jarang mahasiswa sering mengeluh dengan pengembalian sisa pembelian dengan barang yaitu permen, karena mahasiswa menganggap uang lebih penting.

Seharusnya tidak semestinya juga pihak pedagang mengabaikan hak pembeli yaitu mahasiswa yang ingin agar uang kembalian berbentuk uang tunai bukan dalam bentuk barang yaitu permen. Kemudian dalam pandangan hukum Islam tidak boleh memakan harta orang lain secara batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka yaitu adanya kerelaan khususnya pihak pembeli. Bahwa dalam hukum Islam suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah jika adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

**Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap
Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang (Studi
Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan
Lampung)**

Nama : Wulan Widiya Astuti

NPM : 1421030310

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

NIP. 196010211991031002

Eti Karini, S.H., M.Hum.

NIP. 197308162003122003

**Ketua Jurusan Muamalah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S. Ag., M.H

NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGEMBALIAN SISA PEMBELIAN DENGAN BARANG** (Studi Kasus Pada Kantin Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) disusun oleh **Wulan Widiya Astuti, NPM 1421030310, Jurusan Muamalah.** Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 14 Mei 2018.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. Susiadi A.S., M. Sos.I.

Sekretaris : Kartika S, S.Pd, M.Pd.

Penguji I : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H.,M.M.

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.

**DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH**

**Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag.
NIP: 197009011997031002**

MOTTO

لَا تَجْرَ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا إِلَّا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَاءُ

Artinya :

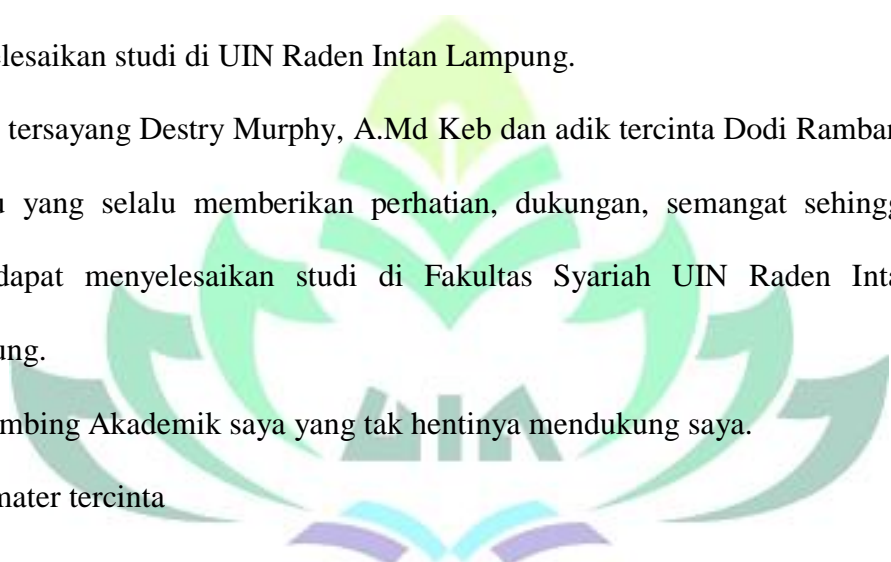
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(Q.S : An-Nisa : 29).¹



¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), hal. 77

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas hidayah-Nya, karya ilmiah skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Edy Mulyono dan Ibu Nurhayati yang selalu dengan tulus ikhlas mendidik, menyayangi, mendukung, membiayai serta mendoakan setiap langkah selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung.
 2. Kakak tersayang Destry Murphy, A.Md Keb dan adik tercinta Dodi Rambang Perabu yang selalu memberikan perhatian, dukungan, semangat sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
 3. Pembimbing Akademik saya yang tak hentinya mendukung saya.
 4. Almamater tercinta
- 
- A large, faint watermark logo of UIN Raden Intan Lampung is centered in the background. It features a stylized green lotus flower with a yellow center, surrounded by green curved lines and a blue and purple base.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap adalah Wulan Widiya Astuti, di lahirkan di Puskud Sukabumi Bandar Lampung pada tanggal 03 Juli 1995.

Wulan Widiya Astuti merupakan anak ke dua dari Tiga (3) bersaudara, yang mempunyai kakak bernama Destry Murphy A.Md dan adik bernama Dodi Rambang Prabu, yang lahir dari pasangan Bapak Edy Mulyono dan Ibunda Nurhayati.

Adapun pendidikan yang di tempuh :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sukabumi Indah Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2008.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 24 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2011.
3. Melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2014.
4. Pada tahun yang sama 2014 diterima di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syaria'ah dengan mengambil Program Studi Muamalah (Hukum Bisnis Islam).

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayah, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (studi kasus pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)”. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikut yang setia.

Skripsi ini di susun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu Syari’ah dan Hukum.

Selama penggarapan skripsi ini, banyak sekali pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini ribuan terimakasih yang terhingga di hanturkan kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN RadenIntan Lampung
3. Dr. H. A. Khumaidi Ja’far, S.Ag., M.H. selaku ketua jurusan muamalah dan Khoiruddin, M.S.I, selaku sekretaris jurusan mumalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

4. Drs. H. Irwantoni, M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Eti Karini, M.Hum selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, mendukung serta memberikan petunjuk dalam rangka penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta agama kepada saya selama menempuh perkuliahan di kampus.
6. Sahabat ku tercinta Eni Susilowati dan Julia Nurma Syahria serta teman-teman seperjuanganku Jurusan Muamalah angkatan 2014 kelas C yang telah memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini baik dalam hal penelitian dan tulisan masih jauh dari kata sempurna, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu, dimohon kepada pembaca yang budiman kiranya dapat memberikan masukan dan saran-sarannya guna melengkapi tulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, Januari 2018

Penulis

Wulan Widiya Astuti

Npm: 1421030310



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam	15
1. Pengertian Akad	15
2. Dasar Hukum Akad	16
3. Rukun dan Syarat Akad	18
4. Macam-macam Akad	22
5. Berakhirnya Akad	26
B. Jual Beli Menurut Hukum Islam	27
1. Pengertian Jual Beli	27
2. Dasar Hukum Jual Beli	28
3. Rukun dan Syarat Jual beli	33

4. Macam-macam Jual Beli	39
C. Jual Beli Menurut Hukum Perdata	43
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	43
2. Syarat-syarat Perjanjian Jual Beli	45
3. Macam-macam Perjanjian Jual Beli	48
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak	51

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung	57
B. Pelaksanaan Akad Jual Beli Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung	59
C. Praktik Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang	61
1. Data pihak yang bertransaksi	61
2. Faktor terjadinya Pengembalian Sisa Pembelian dengan Barang	69

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung	71
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung	74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Acara Seminar
2. Surat Izin Permohonan Riset Kesbangpol Pemerintah Provinsi Lampung
3. Pedoman Interview
4. Surat Wawancara
5. Quisioner Mahasiswa
6. Kartu Konsultasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara rinci guna untuk lebih memahami dan memudahkan dalam membuat skripsi tentang pengembalian sisa pembelian dengan barang, maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan secara singkat beberapa kata yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus pada Kantin Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)”. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul diatas maka penulis uraikan secara singkat mengenai judul diatas:

Menurut *fuqaha*, Hukum Islam adalah “Koleksi daya upaya para ahli hukum untuk Syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.²

Pengembalian adalah proses, cara, perbuatan dengan cara mengembalikan atau yang dikembalikan uang nya yang belum diserahkan.³

Sisa adalah kelebihan dalam suatu transaksi jual beli dalam pembayaran yang dilakukan.

Pembelian adalah proses, cara, perbuatan dengan cara membeli suatu barang maupun jasa.⁴

² Hasby Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 44

³ Deny Sugiono, Sugiono, dkk, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 661

⁴ Ibid, hal. 163

Barang secara kamus besar bahasa Indonesia berarti suatu benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau yang berjasad).⁵

Jadi, yang penulis maksud dalam pengembalian sisa pembelian dengan barang adalah suatu transaksi jual beli dimana penjual memberikan barang berupa permen sebagai sisa pembelian, karena penjual tidak mempunyai uang pas. Dalam transaksi ini belum tentu para pembeli menyetujui serta ikhlas (ridha) menerima barang sebagai pengembalian sisa pembelian. Sehingga dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengembalian sisa pembelian dengan barang.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang” ini yaitu :

1. Secara Objektif, sering terjadi praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang dan barang tersebut diberikan berupa permen karena penjual tidak mempunyai uang pas pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.
2. Alasan Subjektif , agar penulis mendapatkan gelar di Fakultas Syari’ah hal mana penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tempat

⁵Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 544

penulis menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan, serta agar penulis mampu memahami topik yang dibahas, data dan literatur yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup tersedia sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

C. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* bersifat universal dan fleksibel, ia memiliki kemampuan dalam merespon perkembangan umat manusia dan perubahan zaman. Hukum Islam merupakan sebagian dari ajaran Islam yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya mengenai akidah dan akhlak yang dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia. Fiqh Islam cenderung berbicara tentang hukum syara' yang bersifat *amaliyah* (perbuatan manusia) yang mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi zaman.

Hukum Islam harus mampu merespon dan menjawab berbagai macam persoalan umat yang semakin banyak. Persoalan tersebut menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan bagaimana fiqh muamalah dikembangkan dalam rangka menjawab berbagai persoalan bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer saat ini. Seperti halnya permasalahan mengenai pengembalian sisa pembelian menggunakan barang yang pembahasannya dalam kitab-kitab fiqh klasik masih terlalu global, sehingga diperlukan adanya kajian terlebih mendalam mengenai persoalan tersebut.

Dalam Islam jual beli (*al-bai wal syira'*) yaitu pertukaran antara benda dengan uang atau harga, dimana usaha atau perdagangan harus dilakukan

secara sukarela (*ridha*) diantara para pihak dan dengan cara yang dibenarkan sesuai dengan aturan syara.⁶ Dimana jual beli harus ada persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli setuju untuk melakukan transaksi jual beli tanpa adanya paksaan.⁷

Jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal yang benar.⁸ Hal ini senada dengan Firman Allah SWT, Surat An-Nisa ayat 29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu”.⁹

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi kriteria suatu transaksi yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka di dalamnya. Segala bentuk transaksi yang tidak terdapat padanya unsur suka sama suka maka transaksi itu adalah batil yang berarti memakan harta orang lain secara tidak sah.¹⁰

Dalam Hukum Islam hak pembeli adalah untuk menerima pengembalian dari harga yang telah dibayarkan harus ditunaikan kecuali ada

⁶Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hal. 212

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 143

⁸Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 366

⁹Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syigma, 2009), hal.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 190

persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.

Rasulullah Saw, bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن

هشام)

Artinya: “*Sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan*”
(*Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah*).¹¹

Adapun salah satu perubahan sosial, cara pandang, dan perilaku para penjual yang memunculkan persoalan baru bagi hukum Islam adalah semakin maraknya praktik pengembalian sisa pembelian dengan menggunakan barang. Praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang tersebut muncul dilatarbelakangi adanya tradisi para pedagang pada saat melakukan transaksi jual beli yang dilakukan pada kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung, yaitu memberikan permen sebagai alat pengembalian sisa pembelian.

Pengembalian menggunakan barang yaitu berupa permen menjadi alasan bagi para pedagang dalam melakukan transaksi jual beli pada kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dimana pada saat melakukan transaksi jual beli mahasiswa memberikan uang sebagai alat pembayaran kepada pedagang, namun pedagang memberikan pengembalian sisa pembelian dengan barang yaitu permen jika pedagang tidak mempunyai uang pas seperti uang Rp. 500 maupun Rp. 1.000. Jika pedagang tidak mempunyai uang pas Rp. 500 maka pedagang akan memberikan tiga buah permen dan jika

¹¹ Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini wa Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz 7, (Kairo: Mawqi Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah, t.th) hadis ke-2269, hal. 10

pedagang tidak mempunyai uang pas Rp. 1.000 maka pedagang akan memberikan enam buah permen, tetapi jika pengembalian sisa pembelian diatas Rp. 2.000 maka pedagang selalu memberikan pengembalian sisa pembelian berupa uang.¹²

Dalam hal ini, pengembalian sisa pembelian yang dialihkan dengan permen itu dapat menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum Islam yang telah ditetapkan, sebab kegiatan tersebut akan merugikan jika pembeli tidak ikhlas (ridha). Sistem tersebut lebih terkesan pemaksaan karena tidak semua pembeli yaitu mahasiswa rela uang kembalian diganti dengan barang yaitu permen dan uang dianggap lebih penting. Sehingga dengan adanya praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang banyak mahasiswa yang merasa tidak rela serta tidak setuju karena bagi mahasiswa uang dianggap lebih penting dari pada barang yaitu permen. Selain itu dalam hal sisa pengembalian yang diganti dengan barang yaitu permen, dimana akad yang terjadi bukan merupakan kehendak kedua belah pihak melainkan hanya merupakan kebijakan dari pedagang kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung dan Mahasiswa (pembeli) tidak dimintai persetujuan terlebih dahulu.

Kesepakatan atau persetujuan dapat dinyatakan dengan akad, apabila dikaitkan dengan jual beli maka yang di maksud akad adalah ikatan atau perjanjian atau kesepakatan antara penjual dan pembeli, sehingga jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan sebab ijab kabul

¹² Wawancara dengan pak Rebo, tanggal 22 desember 2017

menunjukkan adanya kerelaan (keridhaan).¹³ Hal itu bertujuan agar dalam kegiatan menukarkan barang yang ditunjukan dengan saling memberi dan menerima dengan pertimbangan untuk mendapatkan manfaat dan memelihara nilai keadilan.

Hal ini mengundang permasalahan tersendiri akan hukum dari praktik sisa pengembalian pihak pembeli. Muncul kekhawatiran akan adanya ketidakadilan serta keterpaksaan dari salah satu pihak yaitu pihak pembeli, justru hal ini dapat menyebabkan gugurnya akad atau batalnya akad yang dikarenakan adanya unsur keterpaksaan bukan lagi unsur saling rela.

Untuk sampai pada pemahaman yang mendalam mengenai fenomena tersebut, perlulah dikemukakan pandangan hukum Islam terhadap praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang tersebut. Oleh karena itu, umat Islam kontemporer dituntut harus mampu memformulasikan hukum dan ajaran sesuai dengan tuntunan masa dan lingkungannya, dengan berdasarkan sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan al-Hadist sehingga sesuai dengan faedah ajaran Islam.

Berdasarkan keterangan diatas, maka dari itu saya tertarik melakukan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas dengan judul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)”**. Sehingga penyusun merasa bahwa persoalan ini perlu dikaji secara mendalam, agar dalam realitanya dapat dipraktikkan dengan berpegang pada

¹³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 35

aturan-aturan hukum Islam serta sesuai dengan *maqasid as-syariah*. Sehingga tidak ada keraguan bagi umat Islam khususnya terhadap praktik pengembalian sisa harga dengan barang.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang yang dilakukan pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengembalian sisa pembelian dengan barang yang dilakukan pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

ada beberapa alasan yang menjadi motifasi untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran

fakta-fakta. Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun penulisan ini, menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengambil data dari lapangan (*Field Research*). Dalam hal ini data bersumber dari kalangan pedagang Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung dan dari kalangan mahasiswa maupun mahasiswi UIN Raden Intan Lampung.

Selain penelitian lapangan, penulis juga didukung dengan penelitian pustaka, yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya: buku, catatan, koran, dokumen, jurnal, artikel dan referensi lainnya yang berkaitan dengan data pandangan hukum Islam terhadap pengembalian sisa pembelian dengan barang.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena

tertentu.¹⁴ Dalam kaitan penelitian ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang sistem praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang di maksud. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data sekunder.¹⁵

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian. Selanjutnya data ini disebut data langsung atau data asli, adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang di lakukan dalam konsep kehidupan yang sebenarnya.

Data yang di peroleh atau di kumpulkan peneliti langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian yaitu data tentang pengembalian sisa pembelian dengan barang pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung. Data primer merupakan suatu sumber pokok

¹⁴Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hal. 58

¹⁵Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung : Sinar Baru, 1991), hal. 132

dalam skripsi ini, serta data tentang pengalaman mahasiswa sebagai pembeli serta pedagang Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-Qur'an, al-Hadits, kitab-kitab Fiqh, buku-buku, dan literature yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data ini kemudian dipergunakan sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Umumnya data sekunder tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah Sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.¹⁶ Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah orang yang terlibat atau mengalami transaksi pengembalian sisa pembelian dengan barang tersebut, baik itu pedagang kantin syariah UIN Raden Intan Lampung maupun mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu jelas dan

¹⁶Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2012), hal. 172

lengkap serta dianggap mewakili dari populasi.¹⁷ Dalam hal menentukan sampel, skripsi ini dalam menetapkan sampelnya menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.¹⁸

Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang pengembalian sisa pembelian dengan barang. Jumlah sampel yang akan diambil pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung terdiri dari 11 pedagang dan mahasiswa sebanyak 35 orang yang sering berbelanja yaitu: Fakultas Syariah sebanyak 10 orang, Fakultas Febi sebanyak 10 orang, Fakultas Tarbiyah sebanyak 5 orang, Fakultas Dakwah sebanyak 5 orang, dan Fakultas Unsuludin sebanyak 5 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan jelas menganalisis langsung objek penelitian dalam teknik ini penyusun menggunakan metode yaitu:

a. Wawancara(*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁹ Metode wawancara ditunjukkan kepada 11

¹⁷ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (UIN Raden Intan Lampung: Fakultas Syariah, 2014), hal. 81

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 186

¹⁹ *Ibid.*, hal. 83

pedagang Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung dan 35 mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.

b. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan maksud melihat, mengamati, merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.²⁰ Kemudian dibuat catatan tentang fakta-fakta yang ada hubungannya dengan pengembalian sisa pembelian dengan barang berupa permen yang terjadi pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :²¹

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji. Dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang

²⁰Muhammad Musa dan Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gunung Agung, 1988), hal. 66

²¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 126

terkumpul sudah cukup lengkap dengan data yang diperoleh dari studi literatur tentang pengembalian sisa pembelian dengan barang tersebut.

b. Sistematisasi Data (*Sistematizing*)

Sistematisasi data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu, pandangan hukum Islam terhadap praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang yang akan dikaji menggunakan data yang bersifat kualitatif yaitu metode sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Adapun metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk mengetengahkan data-data mengenai pengembalian sisa pembelian dengan barang yang sifat umumnya terjadi di Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berartiperikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad.²²

Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan suatu pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.²³

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).²⁴

²² Trisadini P.Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 45

²³ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hal. 223

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 51

Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah :

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِخْلِهِ، سِوَاءُ صَدَرِي بِإِرَادَةٍ مُنْفَرَدَةٍ
كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَةِ وَالطَّلَاقِ أَمْ إِحْتِيَاجَ إِلَىٰ إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَاءِهَا
كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ

Artinya: “Segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti waqaf, pembebasan, thalaq, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, ijarah, wakalah, dan rahn”.²⁵

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh kepada sesuatu.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah pertalian suatu ikatan antara ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memenuhi akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.

2. Dasar Hukum Akad

a. Landasan Al-Qur'an

Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Swt dalam surat Al-Maidah (5) ayat 1 sebagai berikut :

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz. 4, (Libanon: Dar al-Fikri, 1984), hal. 80

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
 إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا
 يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah (5) : 1).²⁶

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

b. Landasan Al-Sunnah

Hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh HR Bukhori tentang kebatalan suatu akad antara lain:

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمُكَاتَبِ
 شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، أَوْعَمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ
 كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah Rhodiyallohu 'anhuma dalam kitab Syurutuhum Bainahum, berkata ”Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat” (HR Bukhori).²⁷

Maksud dari hadits diatas bahwa suatu akad yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak.

²⁶ Departemen agama RI, *Op.Cit.* hal. 85

²⁷ Imam Zainuddin az-Zubaidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Marja, 2018), hal. 469

Masing-masing pihak haruslah ridho atau rela akan isi akad tersebut atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak serta tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun akad menurut jumhur fuqaha terdiri dari yaitu:²⁸

1. Orang yang berakad (*'aqid*), contoh: penjual dan pembeli.
2. Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*), contoh harga atau yang dihargakan.
3. *Shighah* atau pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan qabul.

Ulama Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *shighah al-aqd* yaitu ijab dan qabul, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad tidak termasuk rukun akad tetapi syarat akad²⁹.

Shighah al-aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). *Shighah al-aqd* dinyatakan melalui ijab dan qabul dengan suatu ketentuan:

1. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami.
2. Antara ijab dan qabul harus dapat kesesuaian.

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 103

²⁹ *Ibid.*, hal. 104

3. Pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

Ijab dan qabul dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, dan tulisan (biasanya transaksi yang besar nilainya). Namun, semua bentuk ijab dan qabul itu mempunyai nilai kekuatan yang sama.³⁰

b. Syarat Akad

Adapun syarat-syarat akad adalah:³¹

1. *Al-Aqid* (pihak-pihak yang berakad)

Al-Aqid adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki dan anak kecil yang belum *mumayyid* tidak sah melakukan transaksi jual beli dan sebagainya. *Al-Aqid* juga didefinisikan sebagai orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi ijab dan qabul tanpa adanya *aqid*.

Aqid diisyaratkan mempunyai kemampuan (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad yakni mempunyai kewenangan melakukan akad. *Ahliyah* adalah kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima beban syara' berupa hak-hak dan kewajiban serta kesahan tindakan hukumnya, seperti berakal dan *mumayiz*. *Wilayah* merupakan kekuasaan atau kewenangan secara syar'i yang memungkinkan pemiliknya

³⁰ *Ibid.*, hal. 104

³¹ Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 94-100

melakukan akad dan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum.

2. *Al-Ma'qud 'alaih* (objek akad), disyaratkan:

- a. Sesuatu yang diakadkan ada ketika akad, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli buah-buahan masih dalam putik. Akan tetapi para fuqaha' mengecualikan ketentuan ini untuk ada *salam*, *ijarah*, *hibah*, dan *istishna'*, meskipun barangnya belum ada ketika akad, akadnya sah karena dibutuhkan manusia.
- b. Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syariat, suci, tidak najis atau benda *mutanajis* (benda yang bercampur najis). Tidak dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang dilarang agama (*mal ghairu mutaqawwin*), seperti jual beli darah, narkoba, dan lain sebagainya.
- c. Objek akad dapat diserahterimakan ketika akad. Apabila barang tidak dapat diserahterimakan ketika akad, maka akadnya batal, seperti jual beli burung di udara.
- d. Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Caranya dapat dilakukan dengan menunjukkan barang atau dengan menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik barang. Keharusan mengetahui objek yang diakadkan ini menurut para fuqaha' adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan antara para pihak yang berakad. Hal ini

berdasarkan pada larangan yang terdapat dalam hadits Nabi yang melarang jual beli *gharar* dan jual beli *majhul* (bendanya tidak diketahui).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
نَهَى عَنْ بَيْحِ الْحَصَاةِ وَبَيْحِ الْخَرَرِ. (راه مسلم وغيره)

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang jual beli sperma pejudian dan jual beli yang mengandung tipuan" (Riwayat Muslim dan lain-lainnya).³²

- e. Bermanfaat, baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi ataupun immateri. Artinya, jelas kegunaan yang terkandung dari apa yang diakadkan tersebut.

3. *Shighat Al-Aqid*

Shighat al-Aqid adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. *Shighat* terdiri dari ijab dan qabul. *Ijab* merupakan pernyataan yang menunjukkan kerelaan yang terjadi lebih awal dari salah seorang yang berakad. Perkataan yang pertama dalam jual beli dinamakan ijab, baik berasal dari penjual maupun pembeli.

Sementara *qabul* adalah sesuatu yang disebutkan kemudian yang berasal dari salah satu pihak yang berakad yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaannya sebagai jawaban

³² Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilai Asad As-Saibani, *Musnad Ahmad*, juz. 20, (Kairo: Mawqi' Wizarah al-Awqaf al-Misriyah,t.th), hal. 409, hadis ke 9878

dari ucapan pertama. *Qabul* ada kalanya berasal dari penjual dan adakalanya juga dari pembeli ketika akad berlangsung.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al-qad* yaitu:

- a. *Shighat al'aqad* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian. Seperti “aku serahkan ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal.
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan tidak terpaksa dan tidak diancam atau tidak ditakut-takuti oleh orang lain.

4. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari keabsahannya menurut syara', akad di bagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :³³

- a. Dilihat dari sifat akad secara syariat
 1. *Aqad Shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

³³ Abdullah al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hal. 32-37

Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah *aqad shahih* terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a) *Aqad nafiz* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mampu dan mempunyai wewenang untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh seseorang yang berakal dan dewasa terhadap hartanya sendiri. Akad ini memunculkan implikasi hukum terhadap para pihak dan objek akadnya.
- b) *Aqad Mawquf* adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil mumayyiz.

2. *Aqad ghairu shahih*

Aqad ghairu shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad *ghairu shahih* menjadi dua macam, yaitu:

- a) *Akad Bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur penipuan,

seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

- b) *Akad Fasid* adalah akad yang pada dasarnya dibolehkan disyariat. Namun ada unsur-unsur yang tidak jelas menyebabkan akad itu terlarang. Misalnya, melakukan jual beli sebuah rumah dari beberapa rumah yang tidak dijelaskan mana rumah yang dimaksud.

b. Dilihat dari bernama atau tidaknya suatu akad

- 1) *Aqad Musammah* yaitu akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara' serta dijelaskan hukum-hukumnya. Seperti jual beli, sewa-menyewa, perkawinan dan sebagainya.
- 2) *Aqad Ghair Musammah* yaitu akad yang tidak ditetapkan nama-namanya oleh syara', dan tidak pula dijelaskan hukum-hukumnya, akad ini muncul karena kebutuhan manusia dan perkembangan kehidupan masyarakat, seperti *aqad istishna' bai' al-wafa'*.

c. Dilihat dari sifat benda

- 1) *Aqad 'ainiyah* yaitu akad yang untuk kesempurnaannya dengan menyerahkan barang yang diakadkan, seperti *hibah, ariyah, wadi'ah, rahn, dan qiradh*.
- 2) *Aqad ghair 'ainiyah* yaitu akad yang hasilnya semata-mata akad. Akad ini disempurnakan dengan tetapnya shighat akad. Menimbulkan pengaruh akad tanpa butuh serah terima barang.

Ia mencakup seluruh akad selain akad ainiyah, seperti akad amanah.

d. Dilihat dari sah dan batalnya akad

- 1) Akad *Shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
- 2) Akad *Fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya baik syarat umum maupun syarat khusus. Seperti nikah tanpa wali.

e. Dilihat dari berlaku dan tidaknya akad

- 1) Akad *nafidzah* yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.
- 2) Akad *mauqufah*, yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad *fudhuli* (akad yang berlaku setelah disetujui oleh pemilik harta).

5. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai masa tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.

c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :

- 1) Jual beli yang dilakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
- 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
- 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.³⁴

B. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

a. Menurut bahasa (etimologi)

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut *syara'* artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad).³⁵

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*, hal ini sebagaimana firman Allah Swt:

.....يَرْجُونَ تَجْرَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٣٩﴾

Artinya: "Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi" (Q.S Faatir (35) : 29).³⁶

Berdasarkan definisi di atas, jual beli menurut bahasa atau etimologi adalah tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu.

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 71

³⁵ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal. 402

³⁶ Departemen agama RI, *Op.Cit*, hal. 205

b. Menurut istilah (terminologi)

1. Menurut ulama Hanafiah

وَهُوَ مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مُخَصُّوصٍ

Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.³⁷

2. Menurut ulama Malikiyah

فَهُوَ عَقْدٌ مُحَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ وَلَا مُتَحَةٍ لَذَّةٍ .

Artinya: “Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati” (Menurut Imam Syafi’i).³⁸

3. Menurut Ibnu Qudamah

مُبَا دَلَةُ الْمَالِ بِالْمَلِ تَمْلِكَا وَتَمْلِكَا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik”.³⁹

4. Menurut Imam Syafi’i

Jual beli yaitu pada prinsipnya diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.⁴⁰

³⁷ Adurrahman Al-Jazairi, *Khitabul Fiqh ‘Alal Madzahib al-Arba’ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), hal. 134

³⁸ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihaya Al-Muhtaj*, Juz. III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), hal. 204

³⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz III, hal. 559

⁴⁰ Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hal. 1

5. Menurut Istilah Fiqh

Jual beli menurut kamus fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti suatu proses pemindahan hak milik (barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.⁴¹

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam) dan disepakati.⁴²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'. Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan hukum dasar setiap transaksi jual beli adalah mubah (diperbolehkan), apabila terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual. Transaksi apapun tetap diperbolehkan, kecuali transaksi yang dilarang oleh Rasulullah Saw.⁴³

Adapun dasar hukum Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, serta pendapat para ulama antara lain:

⁴¹ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 26

⁴² H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), ha. 1278

⁴³ Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, (Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2008), hal. 528

a. Landasan Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, memberikan dasar-dasar diperbolehkannya jual beli guna memenuhi hidup orang Islam. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT yaitu:

1) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q,S Al-Baqarah (2) :198).⁴⁴

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (*innam al-bai' matsu al-riba*) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasannya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.

2) Q.S An-Nisaa' (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hal. 47

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu)” (Q.S An-Nisaa (4) : 29).⁴⁵

Ayat diatas menunjukan, bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suk atau sukarela. Tidak lah dibenarkan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi dapat membatalkan transaksi jual beli, serta unsur sukarela itu menunjukkan adanya suatu keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.

b. Landasan Al-Sunnah

Hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ : أَيُّ الْكَسْبِ الطَّيِّبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رواه البزار وصححه الحاكم).

Artinya: “Dari Rifa'ah bin Rafi'i r.a, bahwasanya Nabi Saw. pernah ditanya , “Pekerjaan apa yang paling baik ?” , maka beliau menjawab : “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (H.R Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim).⁴⁶

c. Landasan Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas *mujtahidin* diantara umat Islam tentang hukum syara' peristiwa yang terjadi pada suatu masa

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hal. 84

⁴⁶ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Buluqhu'l Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hal. 303

setelah wafatnya Rasulullah Saw mengenai suatu kejadian atau kasus.⁴⁷

الأَصْلُ فِي الْمُحَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁴⁸

Dari dasar hukum di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli tersebut diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam.

Ulama juga sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat dalam praktik jual beli merupakan hal yang sangat penting. Sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu, Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu antara lain:

⁴⁷ Ahmad Sanusi & Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 43

⁴⁸ Ahmad Sudirman Abbas, *Qowa'id Fiqhiyah*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Radar Jaya, 2004), hal. 68

a. Rukun jual beli

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli antara lain yaitu:⁴⁹

1. *Shighat* (Ijab kabul)

Ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh salah satu pihak yang disampaikan menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan si penjual maupun si pembeli. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.

Dari pengertian *ijab* dan *qabul* yang dikemukakan oleh jumhur ulama dapat dipahami bahwa penentuan *ijab* dan *qabul* bukan dilihat dari siapa dahulu yang menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki.

2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*). Pembeli yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya). Penjual dan pembeli atau disebut juga '*aqid*' adalah orang yang melakukan akad.

⁴⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 114

3. *Ma'qud 'Alaih* (Objek akad)

Objek akad yaitu sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjualbelikan.

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut :⁵⁰

1. Dua pihak yang berakad (penjual dan pembeli), antara lain:

- a) *Baligh* menurut hukum Islam, dikatakan *baligh* (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan telah datang bulan atau haid bagi anak perempuan. Sebagian ulama anak-anak diperbolehkan melakukan jual beli khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.
- b) *Berakal* yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ. (النساء : ٥)

Artinya: "Dan janganlah kamu memberikan hartamu kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya". (Q.S. An-Nisaa (4) : 5)⁵¹

⁵⁰ Ibid., hal. 115-120

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hal. 75

c) Dengan kehendak sendiri atau bukan paksaan

Hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli* (rela sama rela) yang didalamnya tersirat makna *muhtar*, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan bebas dari paksaan dan tekanan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendaknya sendiri adalah tidak sah.

Hal ini sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ج

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (Q.S. An-Nisaa (4) : 29).⁵²

d) Tidak Pemboros atau tidak *mubazir*

Bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli maka jual belinya tidak sah, sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ^ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِـٔ
كَفُورًا^{٥٦}

Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hal. 75

sangat ingkar kepada Tuhannya” (Q.S. Al-Israa (17) : 27).⁵³

2. Objek akad, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Suci atau bersihnya barang. Hal ini sebagaimana hadits

Rasulullah Saw:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِشِ وَهُوَ بِمَكَّةَ
: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْحَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ
فَقِيلَ

Artinya: “Dari Jabir ibn Abdullah r.a.: sesungguhnya ia mendengar Rasulullah Saw. berkata pada tahun penaklukan kota Makkah: “Sesungguhnya Allah dan Rasulullah Saw telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala”(H.R. Bukhori Muslim).⁵⁴

Berdasarkan hadits diatas, kesucian merupakan salah satu syarat jual beli. Jadi, tidak sah menjual arak atau bangkai atau babi atau anjing, berhala karena objek tersebut pada dasarnya sudah dihukumi najis oleh Al-Qur'an.

- b) Milik sendiri yaitu barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada manfaat yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wakalah* (perwakilan). Akad jual beli

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hal. 115

⁵⁴ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*, No. Hadits 2097, hal. 841

mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik, ini berarti benda yang diperjualbelikan harus milik sendiri.

c) Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya. Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik), jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, dan jual beli susu yang masih dalam susu induk (belum diperas).

d) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan, misalnya jual beli burung yang terbang di udara dan ikan di lautan sebab semua itu mengandung tipu daya.

e) Benda yang diperjualbelikan adalah *mal mutaqawwim*

Mal mutaqawwin merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, tidak sah melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya seperti bangkai, babi, minuman keras, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ
 بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ
 السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
 بِالْأَزْلَمِ ۚ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib” (Q.S. Al-Maidah (5) : 3).⁵⁵

3. Shighat atau lafaz akad (ijab dan qabul)

Menurut ulama yang mewajibkan *lafadz* terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan, antara lain: ⁵⁶

- a) Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun *lafadz* keduanya berlainan.
- c) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain seperti kata-katanya, “Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian”.

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hal.79

⁵⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cetakan ke-27, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 282

- d) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun adalah tidak sah.

4. Macam-Macam Jual beli

Jumhur fuqaha membagi jual beli sebagai berikut:⁵⁷

1. Di tinjau dari segi sifatnya

Ditinjau dari segi sifatnya jual beli terbagi dua bagian yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *ghair shahih*. Pengertian jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukun dan maupun syaratnya.

Pengertian *ghair shahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara', dari definisi tersebut dapat dipahami jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki akal yang sempurna, tetapi barang yang dijual masih belum jelas.

Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut disebut jual beli yang *batil*. Akan tetapi, apabila rukunnya terpenuhi tetapi ada sifat yang dilarang maka jual belinya disebut jual beli *fasid*. Di samping itu, terdapat jual beli yang digolongkan

⁵⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 71-83

kepada *ghair shahih* yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab diluar akad.

2. Dilihat dari segi shighatnya

Dilihat dari shighatnya jual beli dapat dibagi menjadi dua yaitu: jual beli *mutlaq* dan *ghair mutlaq*. Pengertian dari jual beli *mutlaq* adalah jual beli yang dinyatakan dengan shighat yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang. Sedangkan jual beli *ghair mutlaq* adalah jual beli yang shighatnya atau disandarkan kepada masa yang akan datang.

3. Dilihat dari segi hubungannya dengan objek jual beli

Ada tiga macam jual beli yang dapat dilihat dari segi objeknya yaitu :

- a. *Muqayyadhah* adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang, disebut dengan barter.
- b. *Sharf* adalah tukar menukar emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan lain (emas dengan perak atau perak dengan emas). Dalam jual beli *sharf* (uang) yang sejenisnya sama disyaratkan hal-hal sebagai berikut yaitu:
 1. Kedua jenis mata uang yang ditukar tersebut harus sama nilainya.
 2. Tunai.

3. Harus diserahterimakan di majelis akad. Apabila keduanya berpisah secara fisik sebelum uang yang ditukar diterima maka akan menjadi batal.
 - c. *Muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
4. Dilihat dari segi harga atau ukurannya

Terdapat empat macam jual beli yang dapat dilihat dari segi harga atau kadarnya yaitu:

 - a. Jual beli *murabahah* dalam arti bahasa berasal dari kata yang akar katanya tambahan. Menurut istilah *fuqaha*, dalam pengertian *murabahah* adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
 - b. Jual beli *tauliyah* menurut istilah syara' adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.
 - c. Jual beli *wadi'ah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.
 - d. Jual beli *musawwamah* adalah jual beli yang biasa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka melakukan.

5. Ditinjau dari segi alat pembayaran. Jual beli ini dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:
- a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
 - b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
 - c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:
 1. Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian).
 2. Jual beli *istishna'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
 - d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.
6. Jual beli ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya objek. Jual beli ini terbagi menjadi dua bagian yaitu :
- a. Jual beli barang yang kelihatan (*bai' al-hadir*), yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek jual beli bisa dilihat atau yang secara formal bisa dilihat.

- b. Jual beli barang yang tidak kelihatan (*bai' al-ghaib*), yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek akad tidak bisa dilihat.
7. Ditinjau dari putus tidaknya akad, jual beli dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :
- a. Jual beli yang putus atau jadi sekaligus (*bai' al bat*), yaitu jual beli yang tidak ada *khiyar* (pilihan) bagi salah satu pihak yang berakad.
 - b. Jual beli *khiyar*, yaitu jual beli dimana salah satu pihak yang melakukan akad memberi kesempatan pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan kepada pihak lainnya.

C. Jual Beli Menurut Hukum Perdata

1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli menurut istilah Belanda adalah “*koop en verkopt*” yang mengandung pengertian bahwa pihak yang satu “*verkoop*” (menjual) sedangkan “*koop*” (membeli).⁵⁸ Ada beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai jual beli, diantaranya pendapat dari Prof. Hilman Hadikusuma S.H, di dalam sebuah bukunya “Hukum Perjanjian Adat”, beliau memberikan pengertian jual beli adalah perbuatan tukar menukar dengan pembayaran dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan berhak menerima

⁵⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1985), hal. 1

pembayarannya dari pembeli, dan pembeli berkewajiban menyerahkan pembayaran (uangnya) dan berhak menerima barangnya.⁵⁹

Prof. R. Subekti mengartikan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harganya.⁶⁰

Perjanjian jual beli adalah perjanjian bahwa penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.⁶¹

Perjanjian jual beli menurut pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁶²

Dengan demikian bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik di mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai asas konsensualisme (kesepakatan) yang menjiwai hukum perjanjian maka perjanjian jual beli akan ada saat terjadinya atau

⁵⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 88

⁶⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Intermasa), hal. 135

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hal. 243

⁶² Sudarsono, *Kamus Hukum cet kelima*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), hal. 196

tercapainya “kata sepakat” mengenai barang dan harga. Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harga belum dibayar”.⁶³

2. Syarat-syarat Jual Beli

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan syarat sahnya perjanjian jual beli dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis dari perjanjian.

Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan supaya terjadinya persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama untuk sahnya perjanjian adalah suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya.

Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal pokok dari

⁶³ Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 159

suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.

Dalam pasal 1330 KUHPdata disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau suatu perjanjian perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.⁶⁴

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat

⁶⁴ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2015), hal. 341

sesuatu. Objek perjanjian juga bisa disebut dengan prestasi. Prestasi terdiri atas :

1. Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang.
2. Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan.
3. Tidak berbuat sesuatu, misalnya tidak mendirikan suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu.⁶⁵

d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Di dalam pasal 1320 KUHPdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 1320 ini, merupakan pasal yang menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif.⁶⁶

Syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian dan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek

⁶⁵ Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 69

⁶⁶ *Ibid*, hal. 67

perjanjian. Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan izinya secara tidak bebas.⁶⁷

Sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka akibatnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali sehingga para pihak tidak dapat menuntut apapun apabila terjadi masalah di kemudian hari.

3. Macam-macam Jual Beli

Ada beberapa macam jual beli yang dikenal, yaitu jual beli dengan percobaan, jual beli dengan contoh, jual beli hak membeli kembali, jual beli dengan cicilan, dan sewa beli. Ada suatu hukum yang mempunyai bentuk khusus yang tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli, tetapi mempunyai hubungan dengan jual beli, yaitu leasing ini dijelaskan diakhir penjelasan mengenai macam-macam jual beli. Jual beli dengan percobaan disebutkan dalam pasal 1463 KUHPdata, yaitu: “jual beli yang dilakukan dengan percobaan, atau mengenai barang-barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat dengan suatu syarat tangguh”.⁶⁸ Hal ini berarti si pembeli baru membeli jadi atau tidaknya jual beli tersebut, setelah pembeli melakukan percobaan atau mencoba barang yang hendak dibeli itu.

⁶⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 20

⁶⁸ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata cet x*, tahun 2007 pasal 1463

Mencoba barang yang dibeli merupakan syarat yang menunda pembelian. Misalnya jual beli barang-barang elektronik, sudah menjadi kebiasaan bahwa seseorang ingin membeli barang elektronik, maka barang tersebut harus dicoba terlebih dahulu. Kemudian barulah si pembeli dapat menentukan jual beli terjadi atau tidak. Percobaan yang dilakukan terhadap barang elektronik itu menunda pelaksanaan jual beli. Jual beli dengan syarat yang harus dipenuhi terjadi agar persetujuan dapat dilaksanakan, karena kebiasaan mencoba barang-barang tertentu. Sehingga jual beli dengan percobaan dapat terjadi secara diam-diam, disamping secara tegas dinyatakan.

Jual beli dengan contoh tidak disebutkan dalam KUHPerdara tetapi hanya disinggung sepintas lalu dalam pasal 69 KUHPerdara, yaitu: “tiap-tiap makelar yang oleh pihak-pihak yang bersangkutan tidak dibebaskan dalam hal ini, ia pun pasti barang yang dengan perantaraannya telah dijual. Sedangkan dalam kenyataannya jual beli dengan contoh ini banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penjual harus menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli sesuai dengan contoh yang diberikan atau diperlihatkan. “pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat memilih apakah jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksapihak yang lain untuk memenuhi perjanjian atau ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.⁶⁹

⁶⁹*Ibid.*, pasal 1267

Ketentuan mengenai jual beli dengan hak membeli kembali dapat ditemukan dalam pasal 1519-1532 KUHPerdara. Dalam jual beli dengan hak membeli kembali, para pihak yaitu penjual dan pembeli dapat memperjanjikan pembeli dengan mneembalikan harga barang dan penggantian biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan oleh pembeli. Jual beli dengan hak membeli ada jangka waktunya, yaitu paling lama lima tahun. Walaupun tidak ditemukan pengaturannya dalam KUHPerdara yang berlaku di Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, jual beli dengan cicilan ini banyak dipakai sebagai bentuk jual beli, jual beli seperti ini dikenal dengan penjualan kredit.

Sewa beli seperti jual beli dengan cicilan, tidak diatur dalam KUHPerdara di Indonesia. Dalam sewa atau jual beli sewa atau *huurkoop*, si pembeli tidak langsung menjadi pemilik barang, melainkan hanya sebagai pemakai belaka saja. Milik atas barang yang disewabelikan itu baru berpindah kepada si pembeli, apabila seluruh harga telah dibayar lunas. Selama harga barang belum dibayar lunas, pembeli tidak boleh menjual barang. Sewa beli termasuk dalam jenis perjanjian jual beli, dan tidak termasuk dalam jenis perjanjian sewa menyewa, meskipun merupakan campuran dari kedua jenis perjanjian tersebut. Oleh karena itu hubungan pembeli dan penjual seperti hubungan sewa menyewa saja, dimana pembeli berhak memakai dan menikmati barang, tetapi secara berkala pembeli harus membayar harga barang.

Pembayaran ini bukan sebagai imbalan atas pemakaian dan penikmatan barang, tetapi sebagai cara untuk memperoleh hak milik.

Mengenai wanprestasi, jika si pembeli tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi harga barang yang disewabelikan itu, atau terlambat atau menunggak pembayarannya maka barang diambil oleh pemiliknya (penjual) dan dengan sendirinya sewa beli menjadi batal. Dengan sistem yang seperti ini, terlihat bahwa penjual atau pemilik barang berada dipihak yang kuat atau menguntungkan dan pembeli atau penerima barang berada dipihak yang lemah.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

a. Hak dan Kewajiban pembeli

Menurut pasal 1513 KUHPerdata, kewajiban pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang tempat dan waktu pembayaran maka si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan barangnya harus dilakukan (pasal 1514).⁷⁰

Kewajiban pembeli juga termuat dalam Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 tentang perlindungan

⁷⁰ Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit*, hal. 170

konsumen. Pembeli sebagai konsumen mempunyai kewajiban dalam proses jual beli sebagai berikut :

1. Membaca informasi dan mengikut prosedur atau petunjuk tentang penggunaan barang dan atau jasa yang dibelinya.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli barang dan atau jasa tersebut.
3. Membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian sesuai nilai tukar yang telah disepakati.
4. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
5. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
6. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan garansi atas barang-barang yang dibuat atau diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.⁷¹

Selain kewajiaban yang harus dilakukannya, pembeli yang dianggap sebagai konsumen juga memiliki hak dalam proses jual

⁷¹ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 51

beli sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen, antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
2. Hak untuk memilih serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak untuk mendapatkan informasi secara benar, jujur, dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
7. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.⁷²

b. Hak dan Kewajiban penjual

Pengaturan tentang kewajiban penjual ini diatur dalam Pasal 1472, 1473 dan 1474 KUHPerdato. Menurut pasal 1474 KUHPerdato pada prinsipnya bagi pihak penjual terdapat dua kewajiban utama dalam perjanjian jual beli, diantaranya yaitu:

⁷²*Ibid*, hal. 38

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang (barang bergerak, barang tetap maupun barang tak bertubuh atau piutang atau penagihan atau klaim) yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada pembeli.

2. Menanggung tentram atas barang tersebut

Kewajiban ini diatur dalam pasal 1491 KUHPerdara. Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tentram merupakan konsekuensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu pihak. Kewajiban tersebut menemukan realisasinya dalam kewajiban untuk memberikan penggantian kerugian jika sampai terjadi si pembeli dirugikan karena suatu gugatan pihak ke tiga.

Selain itu penjual harus menjamin bahwa barang yang dijual tidak memiliki cacat tersembunyi dan cacat yang nyata. Adanya cacat pada barang dapat dijadikan alasan bagi pembeli untuk melakukan penuntutan pembatalan atas dasar salah sangka atau dawling, dan alasan untuk menuntut penjual telah

melakukan wanprestasi atas dasar tidak melaksanakan prestasi menurut kepatutan.⁷³

Selain mempunyai kewajiban, penjual juga memiliki hak dalam proses jual beli antara lain:

1. Menentukan dan menerima harga pembayaran atas penjualan barang, yang kemudian harus disepakati oleh pembeli.
2. Penjual juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pembeli yang beritikad tidak baik, kemudian haknya untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam suatu penyelesaian sengketa yang dikarenakan barang yang dijualnya, dalam hal ini tidak terbukti adanya kesalahan penjual dan sebagainya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dalam hal ini termasuk penjual memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

⁷³ Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 55

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa.
4. Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁴

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantin Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Berdirinya kantin syariah UIN Raden Intan Lampung awal mulanya sudah ada sejak tahun 90an, tetapi pada saat itu pedagang berjualan di bawah pohon dengan menggunakan kursi beton dan hanya ada beberapa pedagang saja yang berjualan karena mahasiswa belum terlalu banyak. Seiring berjalannya waktu pedagang berganti berjualan menggunakan tenda tidak lagi dengan kursi beton. Lalu pedagang dibuatkan bedeng sebagai tempat berjualan dikantin dan diberikan fasilitas.⁷⁵ Sehingga lama kelamaan kantin tersebut dikatakan dengan sebutan kantin panjang sampai saat ini, karena berderat memanjang kesamping.

⁷⁴ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op, Cit.*, hal. 50

⁷⁵ Wawancara dengan pak Rebo sebagai pemilik kantin pak Rebo, tanggal 05 Desember 2017

Sehingga setiap fakultas mempunyai kantin yang termasuk dalam kantin liar yang dikelola di fakultas masing-masing. Dalam hal ini banyak pedagang yang berjualan dimana mana sehingga merusak kebersihan, ketertiban, keindahan, dan keamanan serta kenyamanan lingkungan kampus. Kemudian karena tidak adanya peraturan kantin yang menyangkut kebersihan maupun ketertiban lingkungan kampus karena keberadaan setiap kantin liar di berbagai fakultas, dimana kebersihannya tidak terjamin. Maka timbullah ide kantin itu dijadikan dan dibangun maupun dipusatkan di satu tempat yang dikelola langsung oleh rektorat dalam hal ini bagian rumah tangga untuk menertibkan para pedagang yang berjualan tidak tertib agar terjaminnya kebersihan maupun ketertiban lingkungan kampus.⁷⁶

Pak aziz bagian kabag tata usaha fakultas syariah, mengatakan pada zaman beliau bahwa ada MUI tentang pengelola atau surat kontrak untuk menentukan biaya kontrak sewa sebulan maupun pertahun. Berdirinya kantin sekitar tahun 2007 mulai adanya kantin panjang.

Pedagang menggunakan fasilitas tempat kantin tersebut dengan membayar uang sewa kontrak dalam setahun maupun sebulan tergantung pedagang. Dimana dulu pembayaran mulai dari Rp. 400.000 setahun hingga sampai sekarang naik menjadi Rp. 7.000.000 setahun sama uang keamanan satpam.⁷⁷ Sampai sekarang kantin syariah UIN Raden Intan Lampung yang disebut dengan kantin panjang yang terdiri dari 11 kantin yaitu:

1. Kantin Bude

⁷⁶Wawancara dengan pak Aziz bagian kabag tata usaha, tanggal 06 desember 2017

⁷⁷Wawancara dengan ibu Tumini sebagai pemilik kantin Bude, tanggal 06 desember 2017

2. Kantin Pak Rebo
3. Kantin Unggu
4. Kantin Goyang Lidah
5. Kantin Ibu Istiana
6. Kantin Mba Yuni
7. Kantin Panjang Somay
8. Kantin Anugrah
9. Kantin Ibu Zau
10. Kantin Berkah
11. Kantin Fotocopy

B. Pelaksanaan Akad Jual Beli di Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung

Transaksi jual beli yang terjadi pada kantin syariah UIN Raden Intan Lampung dimana pedagang memberikan pengembalian sisa pembelian dengan berupa barang yaitu permen. Ketika melakukan transaksi jual beli yaitu mahasiswa datang kemudian duduk dan memanggil pedagang untuk memesan menu yang ingin dipesan. Setelah mahasiswa selesai menerima menu yang sudah dipilih lalu mahasiswa memanggil pedagang kantin untuk membayar. Kemudian pedagang kantin menghitung menu yang sudah dibeli mahasiswa, dan mahasiswa membayar menu yang ia beli dengan alat pembayaran berupa uang.

Namun pedagang sering memberikan pengembalian sisa pembelian berupa barang yaitu permen jika tidak mempunyai uang pas seperti Rp. 500 maupun Rp. 1.000. Jika uang kembalian Rp. 500 maka mahasiswa akan

mendapat permen sebanyak tiga buah dan jika Rp. 1.000 maka mahasiswa akan mendapat enam buah permen. Pengembalian sisa pembelian diatas Rp. 2.000 dimana pedagang selalu memberikan pengembalian sisa pembelian dengan berupa uang.

Sehingga transaksi jual beli dengan pengembalian sisa pembelian dengan barang pada kantin syariah UIN Raden Intan Lampung tidak adanya persetujuan terlebih dahulu dari pedagang kepada mahasiswa tetapi hanya kebijakan dari pedagang karena tidak adanya uang pas. Banyak mahasiswa yang tidak rela pengembalian menggunakan barang yaitu permen sehingga mahasiswa harus menerima pengembalian sisa pembelian jika pedagang tidak mempunyai uang pas. Hasilnya, tawaran uang kembalian yang diganti dengan permen seperti sebuah tawaran paksaan yang mana mahasiswa tidak mempunyai pilihan selain berkompromi dan menerima permen dengan lapang dada, meski sebenarnya tidak sedang membutuhkan permen. Sehingga banyak mahasiswa yang mengeluh dengan praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang yaitu permen, karena mereka menganggap uang lebih penting dan bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya dari pada permen.

Dalam transaksi jual beli yaitu harus adanya persetujuan dari pedagang kantin kepada mahasiswa ketika akan memberikan pengembalian sisa pembelian dengan barang agar transaksi tersebut sesuai dengan aturan syariat Islam. Dimana pedagang kantin seharusnya mengupayakan pengembalian sisa pembelian dengan uang bukan berupa permen, karena uang tersebut masih bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya dari pada permen dan tidak semua

mahasiswa UIN Raden Intan Lampung setuju serta dapat menerima pengembalian sisa pembelian berupa permen.

Saat ini penyediaan uang kecil memang menjadi suatu masalah bagi para pedagang kantin syariah. Hal ini memaksa para pedagang khususnya pengelola pedagang kantin syariah UIN Raden Intan Lampung untuk melakukan praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang.

C. Praktik Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang

1. Data Pihak Yang Bertransaksi

a. Penjual

Penjual adalah pihak atau orang yang melakukan transaksi penjualan.⁷⁸ Adapun yang menjadi pihak penjual dalam pengembalian sisa pembelian dengan barang di Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung adalah pedagang kantin.

Tabel 1

Daftar Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung

No	Nama dan Jabatan	Umur	Menjual
1.	Tumini (Pemilik Kantin Bude)	40 Tahun	menjual makanan, minuman serta tekwan.
2.	Rebo (Pemilik Kantin Pak Rebo)	48 Tahun	Pemilik Kantin Pak Rebo menjual mie ayam, bakso, soto dan minuman.

⁷⁸ Deny Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hal. 589

3.	Leni (Pemilik Kantin Unggu)	30 Tahun	Kantin Unggu menjual makanan dan minuman.
4.	Ida (Pemilik Kantin Goyang lidah)	34 Tahun	Kantin Goyang Lidah menjual makanan serta minuman.
5.	Istiana (Pemilik Kantin Istiana)	52 Tahun	Pemilik Kantin Istiana menjual rokok, makanan dan minuman.
6.	Yuni (Pemilik Kantin Mba Yuni)	32 tahun	Pemilik Kantin mba Yuni menjual makanan dan minuman.
7.	Tri (Pemilik Kantin Panjang Somay)	40 Tahun	Kantin Panjang Somay menjual somay, minuman, jajanan, pulsa, dan rokok.
8.	Lili (Pemilik Kantin Anugrah)	41 Tahun	Kantin Anugrah menjual makanan dan minuman.
9.	Zau (Pemilik Kantin Ibu Zau)	38 Tahun	Kantin Ibu Zau menjual makanan dan minuman.
10.	Yana (Karyawan Kantin Berkah)	35 Tahun	Kantin Berkah menjual makanan dan minuman.
11.	Lia (Karyawan Kantin Fotocopy)	23 Tahun	Kantin Fotocopy menyediakan jasa fotocopy dan menjual perlengkapan alat tulis.

Sumber: Wawancara dengan pedagang Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung, tanggal 26 Oktober 2017

b. Pembeli

Pembeli adalah orang yang membeli atas suatu barang.⁷⁹ Dalam hal ini adapun yang menjadi pihak pembeli pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung adalah mahasiswa UIN Raden Intan Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Daftar Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung

No	Nama	Fakultas	Jurusan	Semester
----	------	----------	---------	----------

⁷⁹Ibid, hal. 163

1	Eni Susilowati	Syariah	Muamalah	6
2	Narul Ita Sari	Syariah	Muamalah	4
3	Julia Nurma Syahria	Syariah	Muamalah	3
4	Ayu Afifah	Syariah	Muamalah	6
5	Saidah	Syariah	Muamalah	2
6	Resa Wulandari	Syariah	Muamalah	4
7	Lina Oktasari	Syariah	Muamalah	6
8	Tri Setia	Syariah	Muamalah	6
9	Muhammad Ridho	Syariah	Muamalah	8
10	Ira Amalia	Syariah	Muamalah	6
11	Erhanna Mira S	Syariah	Akuntansi	4
12	Kiki Kurnia	Syariah	Ekonomi	2
13	Lisdiana	Syariah	Perbankan	6
14	Ratu Desta	FEBI	Ekonomi	6
15	Rima Puspita Dewi	FEBI	Ekonomi	2
16	Martin Fajar Sukma	FEBI	Akuntansi	4
17	Firstella Apnizar	FEBI	Ekonomi	8
18	Siti Wulandari	FEBI	Akuntansi	2
19	Nurelita	FEBI	Ekonomi	5
20	Tia Destiana	FEBI	Ekonomi	5
21	Afiful Ikhwan	FEBI	Bahasa Arab	8
22	M Saddam al Rasyid	FEBI	Fisika	9
23	Tri Utami	Tarbiyah	Biologi	4
24	Yowanta Shinta	Tarbiyah	Matematika	8
25	Yudanti Putri	Tarbiyah	Bahasa Arab	5
26	Syonia Aiza Tamara	Dakwah	PGMI	7
27	Uswatun Hasanah	Dakwah	PGMI	4
28	Novita Sari	Dakwah	PGMI	6
29	Renggom Puspita	Dakwah	BKI	8
30	Sarah Halimah	Dakwah	BKI	3
31	Romadhon Fadhilah	Unsuludin	Psikologi Islam	7
32	Rahmad Reno	Unsuludin	Psikologi Islam	5
33	Khoirul Imrah	Unsuludin	Sosiologi Agama	3
34	Febriyansah	Unsuludin	Psikologi Islam	6
35	Ahmad habibi	Unsuludin	Sosiologi Agama	8

Sumber: Wawancara dengan Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dicatat tanggal 17 Mei 2018

Dalam hal ini disajikan beberapa pendapat pedagang kantin syariah UIN Raden Intan Lampung mengenai praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang antara lain:

1. Menurut ibu Tumini sebagai pemilik kantin Bude pada kantin syariah UIN Raden Intan Lampung, jika ditanya apakah sering mengembalikan sisa pengembalian dengan permen beliau mengatakan bahwa sering menggunakan permen sebagai alat sisa pengembalian, dengan alasan karena tidak adanya ketersediaan uang kecil seperti Rp. 500,- sampai Rp. 1.000. Tetapi pengembalian diatas Rp. 2.000 maka akan selalu dikembalikan dalam bentuk uang. Jika ditanya apakah ada kesepakatan terlebih dahulu dengan mahasiswa, ibu Tumini hanya menjawab mau tidak mau melakukan pengembalian sisa pembelian tersebut karena dari pada tidak adanya pengembalian.⁸⁰
2. Menurut ibu Istiana sebagai pemilik kantin Istiana mengatakan sering melakukan praktik pengembalian sisa pembelian berupa barang yaitu permen dengan alasan bahwa hal itu sangat mudah diterapkan karena pada saat sekarang susah untuk mencari uang kecil seperti uang Rp. 500,- sampai 1.000. Hal ini dilakukan mau tidak mau dari pada tidak adanya sisa pengembalian.⁸¹

⁸⁰ Wawancara dengan ibu Tumini selaku Pemilik Kantin Bude, tanggal 22 Desember 2017

⁸¹ Wawancara dengan ibu Istiana selaku Pemilik Kantin Istiana, tanggal 22 Desember

3. Menurut ibu Tri pemilik kantin panjang somay mengatakan sering memberikan permen sebagai alat pengembalian sisa pembelian karena sudah menjadi tradisi di kantin syariah menggunakan permen dan untuk mendapatkan uang kecil itu sangatlah susah, seperti Rp. 5.00,- maupun Rp. 1.000. Tetapi jika pengembalian diatas Rp. 2.000 selalu dikembalikan dalam bentuk uang. Melakukan hal ini dengan alasan dari pada tidak adanya sisa pengembalian maka diberikan permen.⁸²
4. Menurut ibu Zau pemilik kantin ibu Zau mengatakan bahwa pernah melakukan pengembalian sisa pembelian dengan barang yaitu permen jika benar-benar tidak mempunyai stock uang kecil. Tetapi jika ada uang Rp. 500,- maupun Rp. 1.000 maka akan diberikan dalam bentuk uang tetapi jika benar-benar tidak ada maka mahasiswa akan mendapatkan permen sebagai pengembalian sisa pembelian.⁸³
5. Menurut ibu Ida pemilik kantin goyang lidah mengatakan bahwa sering melakukan pengembalian sisa pembelian dengan barang karena dengan alasan tidak mempunyai uang kecil seperti Rp.5.00,- maupun Rp.1.000. Dalam hal ini melakukan pengembalian sisa pembelian mau tidak mau dari pada tidak

⁸² Wawancara dengan ibu Tri selaku Pemilik Kantin Panjang Somay, tanggal 22 Desember 2017

⁸³ Wawancara dengan ibu Zau selaku Pemilik Kantin ibu Zau, tanggal 22 Desember 2017

adanya pengembalian sehingga selalu menstock permen sebagai alat pengembalian kepada mahasiswa.⁸⁴

6. Menurut ibu Lili sebagai pemilik kantin anugrah mengatakan bahwa sering melakukan pengembalian sisa pembelian dengan barang karena susah untuk mencari uang kecil sehingga mau tidak mau memberikan permen sebagai sisa pengembalian.⁸⁵
7. Menurut lia sebagai karyawan kantin Fotocopy mengatakan pernah melakukan praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang karena jika tidak adanya stock uang kecil maka digantikan dengan fotocopy tidak memberikan dalam bentuk permen dengan alasan banyak mahasiswa yang tidak ingin dikembalikan dalam bentuk permen. Jika tidak mempunyai uang kecil maka akan diberikan fotocopy jika Rp.500,- maka akan diberikan 3 buah lembar kertas fotocopy jika Rp. 1.000 maka akan diberikan 10 buah lembar kertas fotocopy.⁸⁶
8. Menurut Yana pemilik kantin berkah mengatakan bahwa sering melakukan praktik pengembalian sisa pembelian karena susah untuk mencari uang kecil seperti Rp.500,- maupun Rp. 1.000. Dalam hal ini dilakukan mau tidak mau dari pada tidak adanya

⁸⁴ Wawancara dengan ibu Ida selaku Karyawan Kantin Goyang Lidah, tanggal 22 Desember 2017

⁸⁵ Wawancara dengan ibu Lili selaku Pemilik Kantin Anugrah, tanggal 22 Desember 2017

⁸⁶ Wawancara dengan ibu Lia selaku karyawan kantin Fotocopy, tanggal 22 Desember 2017

pengembalian, sehingga selalu menstock permen sebagai pengembalian sisa pembelian.⁸⁷

9. Menurut Leni sebagai karyawan kantin ungu mengatakan bahwa pernah melakukan praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang yaitu permen, karena tidak mempunyai uang kecil. Dalam hal ini melakukan pengembalian sisa pembelian dengan barang mau tidak mau dari pada tidak adanya pengembalian sehingga selalu menstock permen sebagai alat pengembalian.⁸⁸

10. Menurut ibu Yuni sebagai pemilik kantin mba Yuni mengatakan bahwa melakukan praktik pengembalian sisa pembelian karena tidak mempunyai uang kecil seperti Rp.500,- maupun Rp.1.000 tetapi jika pengembalian diatas Rp. 2.000 maka akan dikembalikan dalam bentuk uang. Tetapi jika mempunyai uang kecil maka pengembalian selalu dikembalikan dalam bentuk uang bukan barang. Dalam hal ini dilakukan pengembalian dengan barang mau tidak mau dari pada tidak adanya pengembalian sisa pembelian.⁸⁹

11. Menurut pak Rebo sebagai pemilik kantin pak Rebo mengatakan bahwa pernah melakukan praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang dengan alasan bahwa sulit untuk mencari uang kecil seperti Rp.500,- maupun Rp. 1.000. Jika pengembalian Rp.

2017 ⁸⁷ Wawancara dengan ibu Yana selaku karyawan kantin Berkah, tanggal 22 Desember

⁸⁸ Wawancara dengan ibu Leni selaku karyawan kantin ungu, tanggal 22 Desember 2017

⁸⁹ Wawancara dengan ibu Yuni selaku pemilik kantin mba Yuni, 22 Desember 2017

500,- maka mahasiswa akan mendapatkan permen tiga buah tetapi jika pengembalian Rp. 1.000 maka mahasiswa akan mendapat enam permen. Jika ditanya apakah adanya persetujuan menggunakan permen sebagai pengembalian sisa pembeli pedagang hanya menjawab dari pada tidak adanya pengembalian sehingga kantin pak rebo selalu menstock permen sebagai sisa pengembalian jika tidak mempunyai uang pas.⁹⁰

Bahwa jawaban pemilik dan karyawan dari 11 kantin UIN Raden Intan Lampung sama yaitu pernah melakukan transaksi sisa pengembalian dengan permen dan beralasan karena tidak mempunyai uang kecil seperti Rp. 500,- maupun Rp. 1.000. Jika pengembalian Rp. 500,- maka mahasiswa akan mendapatkan tiga buah permen dan jika pengembalian Rp. 1.000 mendapatkan enam buah permen.

Tetapi jika stock uang tersedia maka mahasiswa selalu mendapatkan sisa pengembalian dengan berupa uang. Rata-rata jika pengembalian diatas Rp. 2.000 maka akan dikembalikan dalam bentuk uang. Dan pedagang melakukan pengembalian sisa pembelian dengan barang kepada mahasiswa karena sulit nya mencari uang kecil, sehingga pedagang kantin syariah UIN Raden Intan Lampung selalu menyediakan permen sebagai alat pengembalian.

⁹⁰ Wawancara dengan pak Rebo selaku pemilik kantin pak Rebo, 22 Desember 2017

Mahasiswa/i yang setuju terhadap praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang yaitu permen terdiri dari 12 Mahasiswa/i dan yang tidak setuju terdiri dari 23 Mahasiswa/i.

Hasil wawancara antara penulis dengan mahasiswa yang tidak setuju mengenai praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang pada kantin syariah UIN Raden Intan Lampung antara lain:

1. Menurut Narul Ita Sari ia mengatakan bahwa ia sering mendapatkan pengembalian menggunakan permen ketika berbelanja di kantin syariah. Dalam hal ini ia sangat tidak setuju dengan sistem transaksi pengembalian yang dilakukan pada kantin syariah, karena uang tidak sama dengan permen (uang ya uang permen ya permen). Sehingga dalam hal ini uang belum tentu sama nilainya dengan permen. Sehingga ia tidak rela pengembalian menggunakan barang yaitu permen, dan tindakan pedagang termasuk tindakan memaksa (tidak ada persetujuan) terlebih dahulu tetapi hanya kebijakan pedagang saja karena tidak adanya ketersediaan uang kecil.⁹¹
2. Menurut Julia Nurma Syahria ia menjelaskan bahwa ia sangat tidak setuju dalam transaksi sisa pengembalian yang diberikan oleh pedagang menggunakan permen. Karena alasannya dalam jual beli ketika sisa pengembalian itu harus berbentuk uang bukan berbentuk barang, yang secara tidak langsung adanya unsur

⁹¹ Wawancara dengan Narul Ita Sari selaku mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, tanggal 17 Mei 2018

pemaksaan dari pihak pedagang kantin sehingga akan mengurangi suatu faedah transaksi tersebut. Dan ia sering mendapatkan pengembalian dengan permen di Kantin UIN Raden Intan Lampung, dengan alasan tidak adanya ketersediaan uang receh.⁹²

3. Menurut Ayu Afifah ia mengatakan bahwa ia sangat tidak setuju dan tidak rela dengan adanya praktik pengembalian sisa pembelian, karena transaksi tersebut menyebabkan ketidakadilan pihak pembeli yaitu mahasiswa karena uang dianggap lebih penting dari pada permen. Sehingga tindakan pedagang termasuk tindakan memaksa (tidak ada persetujuan) tetapi hanya kebijakan kantin saja dari pada tidak adanya sisa pengembalian.⁹³
4. Menurut Lina Oktasari ia tidak setuju terhadap sistem pengembalian sisa pembelian menggunakan permen di kantin UIN Raden Intan Lampung, karena uang dianggap lebih berharga dari pada permen walaupun nilainya kecil dan masih bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya. Sehingga tindakan pedagang ketika memberikan permen sebagai alat pengembalian adalah tindakan memaksa (tidak ada persetujuan).⁹⁴
5. Menurut Tri Setia ia tidak setuju dengan adanya sistem pengembalian sisa pembelian dengan barang karena ia

⁹² Wawancara dengan Julia Nurma Syahria selaku mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, tanggal 17 Mei 2018

⁹³ Wawancara dengan Ayu Afifah selaku mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, tanggal 17 Mei 2018

⁹⁴ Wawancara dengan Lina Oktasari selaku mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, tanggal 17 Mei 2018

menganggap bahwa uang lebih bernilai dan seharusnya sesuai dengan ngasihnya (ngasih bayar dengan uang harus kembalian nya dengan uang). Ia juga mengatakan bahwa tindakan pedagang adalah tindakan memaksa yaitu tidak adanya persetujuan terlebih dahulu kepada mahasiswa sehingga ia tidak rela dengan adanya praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang.⁹⁵

6. Menurut Muhammad Rido ia mengatakan bahwa ia sangat tidak setuju karena pengembalian sisa pembelian dengan barang seharusnya pengembalian menggunakan uang, karena sisa pengembalian dengan permen terkadang tidak diperlukan dan membuat pengeluaran menjadi bertambah. Sehingga tadinya si pembeli berniat tidak ingin membeli permen jadi membeli permen dengan alasan pengembalian sisa pembelian tersebut. Sehingga tindakan pedagang kepada mahasiswa merupakan tindakan memaksa tanpa adanya persetujuan dahulu kepada mahasiswa sebagai pembeli.⁹⁶

7. Menurut Ira Amalia ia mengatakan bahwa ia sangat tidak setuju dan tidak rela dengan adanya praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang. Sehingga pengembalian sisa pembelian dengan barang harus dikembalikan dengan uang karena tidak

⁹⁵ Wawancara dengan Tri Setia selaku mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, tanggal 17 Mei 2018

⁹⁶ Wawancara dengan Muhammad Rido selaku mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, tanggal 17 Mei 2018

semua mahasiswa rela dan uang dianggap lebih penting serta bisa dipergunakan lainnya bagi kalangan mahasiswa.⁹⁷

8. Menurut Erhanna Mira S ia mengatakan bahwa ia tidak rela dan tidak setuju dengan adanya sistem pengembalian sisa pembelian dengan barang yaitu permen, karena uang masih bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya bagi kalangan mahasiswa. Serta tidak adanya persetujuan terlebih dahulu antara pedagang kepada mahasiswa tetapi hanya kebijakan pedagang saja sehingga mahasiswa mau tidak mau harus menerima permen sebagai sisa pengembalian.⁹⁸
9. Menurut Kiki Kurnia ia mengatakan bahwa ia tidak rela serta tidak setuju dengan adanya transaksi jual beli dengan sistem pengembalian sisa uang pembeli dengan barang. Seharusnya pihak pedagang mengupayakan adanya pengembalian sisa uang pembeli dengan uang bukan dengan barang karena tidak semua kalangan mahasiswa dapat menerima barang atau permen sebagai alat pengembalian. Karena dalam hal ini uang masih bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya walaupun hanya Rp. 500,- dan Rp. 1.000.⁹⁹

⁹⁷ Wawancara dengan Ira Amalia selaku mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, tanggal 17 Mei 2018

⁹⁸ Wawancara dengan Erhanna Mira S selaku mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, tanggal 17 Mei 2018

⁹⁹ Wawancara dengan Kiki Kurnia selaku mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, tanggal 17 Mei 2018

10. Menurut Rima Puspita Dewi ia mengatakan pernah mendapatkan pengembalian sisa pembelian dengan barang di kantin syariah UIN Raden Intan Lampung ketika sedang berbelanja. Ia tidak setuju karena pengembalian sisa pembelian dengan barang tersebut tidak adil bagi mahasiswa karena uang lebih penting dari pada permen dan masih bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya. Seharusnya pedagang mengupayakan adanya pengembalian sisa pembelian dengan uang bukan dengan barang walaupun nilai uang hanya Rp. 500,- dan Rp. 1.000.¹⁰⁰
11. Menurut Firstella Aprizal ia mengatakan bahwa sering mendapatkan pengembalian sisa pembelian dengan barang pada kantin syariah. Bahwa ia tidak setuju dan tidak rela permen dijadikan sebagai alat pengembalian sisa pembelian, karena walaupun uang Rp. 500,- serta Rp. 1.000 masih bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya jika dikembalikan dalam bentuk permen maka akan merugikan mahasiswa.¹⁰¹
12. Menurut Siti Wulandari ia mengatakan bahwa pernah mendapatkan permen sebagai alat pengembalian sisa pembelian di kantin syariah. Pedagang memberikan permen kepada mahasiswa tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak pedagang. Sehingga dalam hal ini mahasiswa merasa tidak rela jika

¹⁰⁰ Wawancara dengan Rima Puspita Dewi selaku mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, tanggal 17 Mei 2018

¹⁰¹ Wawancara dengan Firstella Aprizal selaku mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, tanggal 17 Mei 2018

pengembalian sisa pembeli dialihkan dengan permen yang secara langsung adanya unsur pemaksaan dan uang dianggap lebih penting karena bisa dipergunakan untuk keperluan lain.¹⁰²

13. Menurut Tia Destiana ia mengatakan bahwa sering mendapatkan permen sebagai pengembalian sisa pembelian ketika berbelanja di kantin syariah. Jika pedagang tidak mempunyai uang kecil maka pedagang akan memberikan permen sebagai pengembalian sisa pembelian sehingga mahasiswa mau tidak mau harus menerima permen dengan lapang dada tanya adanya kompromi terlebih dahulu. Mahasiswa tidak rela dengan pengembalian tersebut karena walaupun Rp. 5.00 serta Rp.1.000 masih bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya.¹⁰³

14. Menurut Afifatul Ikhwan ia mengatakan bahwa pernah mendapatkan pengembalian sisa pembelian di kantin syariah. Dalam hal ini ia sangat tidak setuju karena uang lebih bernilai dari pada permen.¹⁰⁴

15. Menurut Muhammad Sadam Rasyid ia mengatakan bahwa pernah mendapatkan pengembalian sisa pembelian dengan permen walaupun tidak terlalu sering berbelanja di kantin syariah. Pengembalian sisa pembelian yang dilakukan pada kantin syariah

¹⁰² Wawancara dengan Siti Wulandar selaku mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, tanggal 17 Mei 2018

¹⁰³ Wawancara dengan Tia Destiana selaku mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, tanggal 17 Mei 2018

¹⁰⁴ Wawancara dengan Afifatul Ikhwan selaku mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, tanggal 17 Mei 2018

tidak adanya persetujuan terlebih dahulu antara pedagang kantin dengan mahasiswa, tetapi hanya kebijakan pedagang saja karena tidak mempunyai uang kecil seperti Rp. 500,- maupun Rp. 1.000.¹⁰⁵

16. Menurut Tri Utami ia mengatakan bahwa ia tidak setuju dan tidak rela dengan adanya pengembalian sisa pembelian dengan barang. Seharusnya pengembalian tersebut dikembalikan dalam bentuk uang karena tidak semua kalangan mahasiswa dapat menerima permen sebagai pengembalian sisa pembelian. Dan tindakan pedagang tersebut terkesan memaksa yaitu tidak adanya persetujuan terlebih dahulu antara pedagang kantin dengan mahasiswa.¹⁰⁶

17. Menurut Yowanta Shinta ia mengatakan bahwa ia tidak rela dengan sistem pengembalian sisa pembelian dengan barang pada kantin syariah karena uang tidak sama nilainya dengan permen. seharusnya pedagang mengupayakan pengembalian menggunakan uang agar transaksi jual beli sesuai syariat Islam.¹⁰⁷

18. Menurut Syonia Azia Tamara ia mengatakan bahwa pernah mendapatkan permen sebagai sisa pengembalian ketika berbelanja di kantin syariah. Dalam hal ini ia tidak setuju karena

¹⁰⁵ Wawancara dengan Muhammad Sadam Rasyid selaku mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, tanggal 17 Mei 2018

¹⁰⁶ Wawancara dengan Tri Utami selaku mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, tanggal 17 Mei 2018

¹⁰⁷ Wawancara dengan Yowanta Sinta selaku mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, tanggal 17 Mei 2018

permen atau sejenisnya bukan termasuk alat tukar sehingga tidak boleh menjadi pengganti uang kembalian belanja. Tindakan pedagang ketika memberikan permen sebagai sisa kembalian adalah tindakan memaksa yaitu tidak adanya persetujuan terlebih dahulu antara pedagang kantin dengan mahasiswa.¹⁰⁸

19. Menurut Uswatun Hasanah ia mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan adanya pengembalian sisa pembelian dengan permen karena menganggap uang lebih penting dan bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya. Tindakan pedagang ketika memberikan permen adalah tindakan memaksa tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu antara pedagang kantin dengan mahasiswa.¹⁰⁹

20. Menurut Novita Sari ia mengatakan bahwa ia tidak terlalu sering berbelanja di kantin syariah tetapi pernah mendapat pengembalian sisa pembelian dengan permen pada saat berbelanja. Ia tidak rela dan tidak setuju jika pengembalian sisa pembelian diganti dengan permen, karena uang lebih bernilai dan bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya bagi kalangan mahasiswa. Jika pedagang tidak mempunyai uang kecil seperti Rp. 500,- maka mahasiswa akan mendapatkan tiga buah permen

¹⁰⁸ Wawancara dengan Syonia Azia Tamara selaku mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, tanggal 17 Mei 2018

¹⁰⁹ Wawancara dengan Uswatun Hasanah selaku mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, tanggal 17 Mei 2018

dan jika Rp. 1.000 maka akan mendapatkan enam buah permen.¹¹⁰

21. Menurut Sarah Halimah ia mengatakan bahwa pengembalian sisa pembelian tersebut tidak adanya persetujuan terlebih dahulu antara pedagang dengan mahasiswa tetapi hanya kebijakan kantin saja. Ia tidak rela pengembalian menggunakan permen, karena seharusnya pengembalian menggunakan uang.¹¹¹
22. Menurut Ramadhan Fadhi ia mengatakan bahwa pernah mendapatkan permen sebagai pengembalian sisa pembelian di kantin syariah. Dalam praktik pengembalian tersebut ia sangat tidak rela dan tidak setuju karena dalam jual beli sisa ketika pengembalian itu harus berbentuk uang bukan berbentuk barang yang secara tidak langsung adanya unsur pemaksaan.¹¹²
23. Menurut Ahmad Habibi ia mengatakan tidak setuju dan tidak rela dengan adanya pengembalian sisa pembelian dengan barang di kantin syariah karena pengembalian seharusnya dengan uang dan uang tersebut masih bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya bagi kalangan mahasiswa. Pedagang memberikan permen sebagai pengembalian jika tidak mempunyai uang kecil seperti Rp. 500,- maka mahasiswa mendapatkan tiga buah permen dan

¹¹⁰ Wawancara dengan Novita Sari selaku mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, tanggal 17 Mei 2018

¹¹¹ Wawancara dengan Sarah Halimah selaku mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, tanggal 17 Mei 2018

¹¹² Wawancara dengan Ramadhan Fadhli selaku mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, tanggal 17 Mei 2018

jika Rp. 1.000 maka mahasiswa akan mendapat enam buah permen.¹¹³

24. Transaksi pengembalian sisa pembelian dengan barang yang dilakukan pedagang kepada mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yaitu Eni Susilowati, Saidah, Resa Wulandari, Lisdiana, Ratu Desta, Martin Fajar Sukma, Nurelita, Yudanti Putri, Renggom Puspita, Rahmad Reno, Khoirul Imrah, dan Febriyansyah.

Menurut hasil wawancara mereka sependapat tentang pengembalian sisa pembelian dengan permen. Dimana mereka setuju dengan praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang yaitu permen, karena alasannya terkadang pedagang tidak mempunyai uang kecil seperti Rp. 500,- maupun uang Rp. 1.000 untuk mengembalikan sisa uang pembeli. Maka dari itu pedagang memberikan sisa kembalian dalam bentuk barang yaitu permen.

Tindakan pedagang ketika memberikan permen sebagai alat pengembalian adalah tidak memaksa, alasannya dari pada tidak adanya pengembalian sisa pembelian sehingga mereka rela mendapatkan permen bukan uang sebagai alat sisa pengembalian.¹¹⁴

2. Faktor Terjadinya Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang

¹¹³ Wawancara dengan Ahmad Habii selaku mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, tanggal 17 Mei 2018

¹¹⁴ Wawancara dengan Eni susilowati dkk selaku mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, tanggal 17 Mei 2018

Pedagng Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung sudah lama menggunakan permen sebagai alat pengembalian sisa pembelian kepada mahasiswa. Pedagang menyebutkan bahwa alasan memberikan permen sebagai alat sisa pengembalian karena tidak adanya ketersediaan stock uang kecil.

Pedagang kantin memberikan permen sebagai alat pengembalian, karena hal ini lebih mudah dan praktis dari pada tidak adanya pengembalian sehingga pedagang selalu menyediakan permen sebagai alat pengembalian sisa pembelian. Tetapi bila ada stock uang kecil maka pedagang akan selalu memberikan kembalian dengan bentuk uang sesuai dengan sisa pengembalian. Jika tidak adanya stock uang kecil maka akan dikembalikan dengan bentuk barang yaitu permen. pedagang juga mengatakan pengembalian di atas Rp. 2.000 pasti selalu di kembalikan dalam bentuk uang tidak pernah dikembalikan dalam bentuk permen.¹¹⁵

Sisa pengembalian menggunakan barang yaitu permen sudah menjadi kebiasaan atau tradisi di kantin syariah UIN Raden Intan Lampung. Alasan yang paling sering diungkapkan oleh pedagang ketika ditanya mengapa menggunakan permen sebagai alat pengembalian ialah karena tidak adanya ketersediaan stock uang kecil seperti Rp.500,- maupun Rp.1.000.

Dalam hal ini jika ditanya apakah adanya kesepakatan antara pedagang dengan mahasiswa, pedagang pasti hanya menjawab mau tidak

¹¹⁵ Wawancara dengan ibu Tumini selaku pemilik kantin Bude, tanggal 22 Desember 2017

mau dari pada tidak adanya pengembalian sisa pembelian.¹¹⁶ Sehingga transaksi ini tidak adanya kesepakatan terlebih dahulu antara pedagang dengan mahasiswa, melainkan hanya kebijakan dari pihak pedagang karena mau tidak mau dari pada tidak adanya pengembalian sisa pembelian. Hal ini menyebabkan pihak pembeli yaitu khususnya mahasiswa, harus mau tidak mau serta ikhlas tidak ikhlas wajib menerima permen sebagai alat pengembalian sisa pembelian.



¹¹⁶ Wawancara dengan ibu Yana selaku karyawan kantin Berkah, tanggal 22 Desember 2017

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu hasil dari wawancara dan dokumentasi, beserta data kepustakaan baik data yang diperoleh langsung dari kitab-kitab aslinya atau kitab terjemahannya, buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu yang berjudul “pandangan hukum Islam terhadap pengembalian sisa pembelian dengan barang” (studi kasus pada kantin syariah UIN Raden Lampung), maka sebagai langkah selanjutnya akan dianalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab dalam penelitian ini.

Telah diketahui bahwa teks-teks al-Qur'an, sunnah dan pendapat-pendapat terdahulu yang telah terkodifikasi sifatnya terbatas, sementara itu permasalahan-permasalahan serta berbagai peristiwa hukum terus bermunculan dalam jumlah yang tak terbatas. Selain itu, kandungan nash yang begitu luas terkadang menimbulkan pemahaman yang berbeda diantara para mujtahid. Karenanya, dibutuhkan sifat tasamuh dan keterbukaan serta kesadaran pada setiap kita untuk memenuhi hal ini.

Permasalahan-permasalahan yang begitu kompleks biasanya terjadi pada ruang lingkup muamalah, karena dalam lingkup ini manusia diberi kebebasan untuk bertindak selagi tidak berseberangan dengan syara'. Berbeda

dalam lingkup ibadah, dimana dalam hal ibadah yang didalamnya telah diberi batasan dan aturan-aturan serta rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'.

Permasalahan tersebut sejalan dengan bunyi kaidah fiqiyah sebagai berikut :

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: *"Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan"*.¹¹⁷

Seiring dengan permasalahan dalam lingkup muamalah yang begitu kompleks sebagaimana tersebut diatas, permasalahan yang muncul diantaranya adalah mengenai pengembalian sisa pembelian pada transaksi jual beli yang ada di kantin syariah UIN Raden Intan Lampung. Dimana terdapat kondisi tertentu pada saat mahasiswa membayar barang atau makanan yang dibeli, kemudian membayar dengan uang lebih yang berkonsekuensi pada keharusan pihak pedagang untuk mengembalikan sisa pembelian dengan barang yaitu permen. Dalam hal ini pedagang memberikan permen jika sisa kembalian Rp. 500,- maka akan diberikan 3 permen dan jika Rp. 1.000,- maka akan diberikan 6 permen. Seharusnya pedagang memiliki kewajiban untuk mengupayakan sisa kembalian berupa uang bukan dengan permen sehingga transaksi jual beli dikatakan sah.

Pada kantin syariah UIN Raden Intan Lampung biasanya sisa pengembalian tidak terlalu menjadi masalah, karena pedagang sering

¹¹⁷ Mudjib Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hal. 25

memberikan sisa uang pembelian yang belum ada ini dengan memberikan permen sebagai alat kembalian. Jika memang uang recehan masih ada, maka mahasiswa akan mendapatkan uang sebagai alat pengembalian. Saat ini banyak dijumpai penyelesaian sepihak oleh pedagang kantin saja dengan memberikan uang kembalian yang berbentuk barang yaitu permen tanpa melalui proses penawaran dari pihak mahasiswa sebagai pemilik harta yang sesungguhnya (pembeli), sehingga hal ini pun sering terjadi pada kantin syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam hal ini mahasiswa mau tidak mau serta ikhlas tidak ikhlas harus menerima uang kembalian yang digantikan dengan permen.

Keadaan seperti ini biasanya terjadi ketika banyak mahasiswa yang datang ke kantin, sedangkan pihak pedagang tidak selalu mempunyai uang kecil. Sehingga pedagang memberikan permen kepada mahasiswa sebagai pengembalian sisa pembelian. Maka dalam hal ini pedagang kantin berinisiatif memberikan permen sebagai alat pengembalian karena ketidakadaan uang kecil. Seharusnya pedagang mengupayakan pengembalian dalam bentuk uang, karena tidak semua mahasiswa rela sisa pengembalian dengan permen dan uang dianggap lebih bernilai serta bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya. Transaksi jual beli dianggap sah sesuai dengan aturan syariat Islam apabila mahasiswa dan pedagang saling merelakan serta tidak adanya pihak yang merasa dirugikan tentunya dalam hal pengembalian sisa pembelian.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pedagang kantin sebenarnya telah melakukan transaksi seperti pada umumnya di supermarket maupun swalayan yang sedang mengalami gejala kesulitan ketersediaan stok uang recehan sehingga menggunakan sisa pengembalian dengan barang yaitu permen. Tidak pasti hal itu benar atau tidak terkait dengan semakin tidak berartinya nominal uang kecil, hal itu berdampak semakin malasnya para pedagang untuk menyediakan stok uang kecil seperti uang Rp. 500,- maupun Rp. 1.000 yang seharusnya digunakan sebagai pengembalian sisa pembelian.

Di sinilah letak permasalahan, pada kenyataannya banyak mahasiswa yang mengalami kejadian kurang menyenangkan di kantin syariah UIN Raden Intan Lampung. Hal itu terjadi pada mahasiswa, ketika sedang membeli sesuatu dan ternyata sisa kembalian yang diberikan pedagang bukan dalam bentuk uang melainkan diganti sendiri dengan permen.

Dalam Islam Jual beli adalah penjual dan pembeli yang saling tukar menukar barang dengan uang dan saling menentukan harga atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya memperoleh kebutuhan secara sah. Jual beli merupakan perbuatan yang paling sering dilakukan oleh setiap orang baik itu jual beli dalam skala kecil ataupun skala besar. Namun, tidak semua transaksi jual beli dilakukan secara benar. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 pada hal 30, melihat dari praktik pengembalian sisa

pembelian dengan barang pada kantin syariah UIN Raden Intan Lampung adalah hal yang tidak diperbolehkan.

Dimana dalil diatas menegaskan bahwa dilarangnya mengambil harta secara batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka. Pedagang kantin syariah UIN Raden Intan Lampung telah melakukan jual beli bukan atas dasar suka sama suka, melainkan dengan cara memaksa mahasiswa untuk menerima sisa pengembalian dengan barang yaitu berupa permen tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu.

Dimana transaksi tersebut sifatnya memaksa bukan atas dasar suka sama suka, karena belum tentu semua mahasiswa rela permen sebagai alat pengembalian. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.

Rasulullah Saw, bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن محماه)

Artinya: “Sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan” (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).¹¹⁸

Dalam hal transaksi sisa pengembalian menggunakan permen pada kantin tersebut belum tentu semua mahasiswa rela permen sebagai alat kembalikan, karena uang sisa kembalikan tadi bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya. Sehingga mahasiswa yang tadinya tidak berniat membeli permen jadi membeli permen dengan adanya pengembalian tersebut dan

¹¹⁸ Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini wa Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz 7, (Kairo: Mawqf Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah, t.th) hadis ke-2269, hal. 10

pengeluaran menjadi bertambah dengan sisa pengembalian menggunakan permen.

Pengembalian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan dengan cara mengembalikan atau yang dikembalikan uang nya yang belum diserahkan. Sedangkan uang adalah sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa maupun sebagai alat tukar.¹¹⁹ Sehingga pedagang seharusnya mengembalikan sisa kembalian yang belum diserahkan dengan berupa uang bukan barang seperti permen. Karena jual beli harus saling menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Transaksi jual beli dikatakan boleh atau dibenarkan oleh syariat apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah dibahas pada bab II. Transaksi sisapengembalian dengan barang yang dilakukan pedagang dengan mahasiswa telah memenuhi rukun dan syarat, tetapi tidak adanya *sighat* (lafaz ijab dan qabul) dimana hanya kebijakan sepihak dari pedagang karena tidak adanya ketersediaan uang kecil.

Seharusnya transaksi yang dilakukan disertai dengan ijab dan qabul, karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan yang diucapkan kedua belah pihak antara pedagang dan mahasiswa dimana mereka harus mematuhiinya, seperti firman Allah sebagaimana berikut:

¹¹⁹Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hal. 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ۖ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Q.S Al-Maidah (5) : 1).¹²⁰

Transaksi sisa pengembalian dikantin tersebut bahwa ketika mahasiswa memberikan uang lebih saat berbelanja pedagang langsung menyodorkan sisa kembalian berupa permen jika tidak adanya ketersediaan uang receh tanpa adanya kata sepakat antara kedua belah pihak tetapi hanya kebijakan pedagang saja. Namun yang jadi masalah adalah pedagang seolah tidak memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menolak opsi yang ditawarkan oleh pedagang. Karena hal itu meski dalam jumlah nominal terbilang sangat kecil, tetapi mahasiswa menganggap bahwa uang lebih bernilai dari pada permen.

Berdasarkan pengalaman mahasiswa saat berbelanja di kantin jika ingin menolak dan tetap menginginkan sisa kembalian dalam bentuk uang pasti pihak pedagang akan menjawab tidak mempunyai stock uang recehan. Sehingga mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas mahasiswa wajib menerima uang kembalian berupa permen. Hasilnya, tawaran uang kembalian diganti dengan permen seperti sebuah tawaran paksaan yang mana mahasiswa tak mempunyai pilihan selain berkompromi dan menerima permen dengan lapang dada, meski sebenarnya tidak sedang membutuhkan permen untuk menyegarkan mulut.

¹²⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal.85

Tidak Jarang mahasiswa sering mengeluh dengan keadaan itu, karena mereka menganggap uang lebih bernilai dari pada permen.

Seharusnya jual beli yang sah yaitu adanya ijab dan qabul atau kesepakatan serta adanya dasar suka sama suka atau kerelaan antara pihak pedagang dengan mahasiswa agar transaksi tersebut dikatakan sah. Dimana pedagang kantin seharusnya mengupayakan sisa pengembalian dengan uang bukan berupa permen, karena uang dianggap lebih penting bagi mahasiswa walaupun nilainya kecil dan bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya. Sehingga jual beli pada kantin syariah UIN Raden Intan bisa dikatakan sah sesuai dengan syariat Islam, jika antara pedagang dan mahasiswa saling merelakan adanya pengembalian sisa harga dengan barang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian maka berdasarkan hasil peneliti di pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang yaitu permen sudah menjadi kebiasaan di Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam praktik ini pedagang memberikan permen sebagai alat pengembalian jika tidak adanya ketersediaan stock uang kecil. Tetapi jika adanya uang kecil maka pedagang selalu memberikan uang sebagai alat sisa pengembalian. Dalam hal ini mahasiswa mau tidak mau harus menerima pengembalian sisa pembelian dengan barang dari pada tidak adanya pengembalian tanpa adanya kompromi serta kesepakatan terlebih dahulu antara pedagang dan mahasiswa.
2. Dalam pandangan hukum Islam jual beli dilarang untuk memakan harta orang lain secara batil kecuali dengan jalan perniagaan suka sama suka. Pengembalian sisa pembelian dengan barang di Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan kaidah jual beli sesuai syariah Islam. Yakni dimana adanya unsur pemaksaan dari pedagang sehingga tidak adanya persetujuan kepada mahasiswa sebagai pembeli tetapi hanya kebijakan pedagang kantin saja memberikan sisa pengembalian dengan barang. Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung merasa tidak rela dengan adanya pengembalian

menggunakan barang, karena mereka menganggap bahwa uang lebih penting dari pada permen dan bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya. Dengan demikian, praktik pengembalian sisa uang pembeli yang digantikan dengan barang dibolehkan menurut hukum Islam apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan adanya unsur saling ridha sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, maka penulis perlu menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menghindari keharaman dalam pengembalian sisa pembelian yang diganti dengan permen hendaknya pedagang ketika melakukan transaksi jual beli khususnya dalam pengembalian sisa pembelian harus adanya persetujuan terlebih dahulu agar adanya unsur kerelaan maupun unsur suka sama suka khususnya pihak pembeli yaitu mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.
2. Seharusnya pedagang kantin selalu menyediakan stock uang kecil agar tidak terjadinya pengembalian sisa pembelian menggunakan permen, karena tidak semua mahasiswa menyukai permen sebagai alat sisa pengembalian dan uang lebih bernilai dari pada permen. Sehingga jual beli sesuai aturan syariat Islam, yaitu jual beli dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, cetakan ke-2, Jakarta: Kalam Mulia, 2001
- Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, 1995, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Amani
- Al-Fauzan Saleh , *Fiqh Sehari-hari* ,Jakarta : Gema Insani Press , 2005
- Alhfidz Ahsin W, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013
- Ali H.M. Daud i, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991
- Ali Zainuddin , *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika , 2007
- Al-Jazairy Abdulrahman, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzhib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Daru Kutub Al-Ilmiah, 1990
- Al-Mushlih Abdullah & Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008
- Anwar Syamsul , *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Ash-Shiddieqy Hasby , *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang , 1975
- Ash-Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009
- Az-zubaidi Imam Zainuddin, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Bandung: Marja, 2018
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung, Syigma, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama , 2008
- Djamil Fathurrahman , *Hukum Ekonomi Syariah* , Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013
- Hadikusuma Ilman, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Alumni, 1982

Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011

Kaelan , *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* , Yogyakarta : Paradigma, 2005

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012

Miru Ahmadi & Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011

Miru Ahmadi & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982

Muhmmad Abdul Kadir , *Hukum dan Penelitian Hukum* , Jakarta : PT Citra Aditya Bakti , 2004

Muhammad Abdul kadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 2006

Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Nasution , *Metode Research* , Jakarta : PT Bumi Aksara , 2012

Rasjid H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Sanusi Ahmad & Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Kairo, Maktabarah Dar al-Turas, tth, juz III

Setiawan Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016

Soekanto Soejarno , *Pengantar Penelitian Hukum* , Jakarta : UI-PRESS , 2012

Subekti R, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1985

Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: Intermasa

Subekti R. & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata cet x*, tahun 2007 pasal 1463

Sudarsono, *Kamus Hukumcet kelima*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007

Sugono Deny, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Siddiq Muhammad al-amin adh-Dharir & Husain Syahatah , *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta Timur : Visi Insani Publishing , 2005

Susanto Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008

Syarifuddin Amir , *Garis-Garis Besar Fiqh* , Jakarta : Kencana , 2003

Usanti Trisadini P. dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathu*, jilid V, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011

Wirduyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005